

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, baik pengendara roda dua maupun roda empat. Perkembangan zaman *digital* yang sangat pesat membuat Kepolisian Republik Indonesia juga mengikuti perkembangan dengan meluncurkan sistem tilang secara elektronik yang disebut dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penerapan ETLE belum sepenuhnya berhasil mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Polda Metro Jaya. Atas dasar itu, penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana kewenangan Polda Metro Jaya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas setelah berlakunya kebijakan ETLE dan bagaimana efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem ETLE di wilayah Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Polda Metro Jaya setelah berlakunya Electronic Traffic Law Enforcement hanya dapat melaksanakan kewenangan penindakan pelanggaran lalu lintas di luar jenis pelanggaran yang dapat ditangkap oleh kamera ETLE. Kehadiran ETLE belum mampu meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas, tetapi ETLE telah membantu efektivitas dan efisiensi petugas di lapangan dalam hal mengatur dan menindak pelanggaran lalu lintas. Saran kepada Polda Metro Jaya untuk mengembangkan sistem ETLE agar dapat menindak semua jenis pelanggaran lalu lintas dan lebih gencar melakukan sosialisasi penerapan ETLE di wilayah Polda Metro Jaya.

Kata Kunci: ETLE, Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas.

ABSTRACT

Traffic violations are the most common types of violations committed by motorized vehicle drivers, both two-wheeled and four-wheeled drivers. The rapid development of the digital era has made the Indonesian National Police follow developments by launching an electronic fine system called Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). The application of ETLE has not been fully successful in reducing the number of traffic violations in Polda Metro Jaya area. On that basis, this study raises the issue of how the authority of Polda Metro Jaya is in prosecuting traffic violations after the enactment of the ETLE policy and how effective the enforcement of traffic violations is using the ETLE system in the Polda Metro Jaya area. This research uses a type of juridical-normative research with a qualitative approach. The results of this study indicate that the authority of the Polda Metro Jaya after the enactment of the Electronic Traffic Law Enforcement can only carry out the authority to enforce traffic violations other than the types of violations that can be captured by ETLE cameras. The presence of ETLE has not been able to increase public legal compliance with traffic rules, but ETLE has helped the effectiveness and efficiency of officers in the field in terms of regulating and acting on traffic violations. Advice to Polda Metro Jaya to develop the ETLE system so that it can take action on all types of traffic violations and to be more aggressive in implementing ETLE in the Polda Metro Jaya area.

Keywords: ETLE, Tickets, Traffic Violations.